

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia sebagai instansi yang oleh Undang-Undang diberikan peranan yang sangat penting dalam tujuan menciptakan rasa damai dan aman bagi masyarakat di Indonesia, hal demikian juga diatur tegas dalam bagian Menimbang Butir (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia menyatakan:

Bahwa pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan keamanan negara dalam rangka wawasan nusantara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

TNI sendiri terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang masing-masing dikepalai oleh saeorang Kepala staf, merupakan suatu alat pertahanan dan keamanan negara. TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari

berbagai macam ancaman baik dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas NKRI.

Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar maka selain Undang-Undang yang dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku juga tunduk pada sapta marga, selain itu juga karena adanya. Karena adanya beban kewajiban TNI sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai / melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok yaitu sebagai penjaga tegaknya kedaulatan negara oleh karena diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum yang lebih keras. Mengapa diadakan hukum khusus dan lebih keras bagi anggota militer:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apa bila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota

masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.¹

Melihat dari peran TNI yang begitu vital, maka diupayakan agar TNI dijauhkan dari berbagai aspek yang dapat merusak moral TNI diantaranya narkoba, narkoba sendiri yaitu; zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mrngurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan sebagaimana keputusan menteri kesehatan.² Berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika menyatakan bahwa dalam melakukan penyeldikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkoba maka dibentuknya Badan Narkotika Nasional.

Militer sebagai lembaga khusus yang juga mempunyai kekhususan dalam hal peradilannya juga mempuyai lembaga khusus dalam hal penyidikan dan juga penuntutan, mengenai tindak pidana nerkotika diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan ada pada BNN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA POLISI MILITER DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM

¹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 21.

² Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta, Hlm. 69

MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MILITER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah Bagaimana pembagian kewenangan antara Polisi Militer Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Militer?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan antara Polisi Militer Dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh militer?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan narkotika.
2. Manfaat praktis : bermanfaat bagi penyidik di lingkungan peradilan militer dan juga bagi Badan Narkotika Nasional dalam melakukan kordinasi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota militer

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Sri Mujiyono, NPM E0003061 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009:

a. Judul : Analisis Perlindungan Hukum Hak Pada Penyidikan Perkara Pidana.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?
- 2) Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

- Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan,

penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;

- Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
- Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP;
- Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;
- Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP, dan seterusnya. Dalam KUHAP tersangka diberikan hak ;

- Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan.
- Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- Berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi

si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

- 2) Bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediakkannya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan

hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Idrus, B11112143, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016.
 - a. Judul: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI.
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh

Oknum Anggota TNI berdasarkan Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014.

c. Hasil Penelitian:

Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap tindak pidana tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I pada perkara Putusan Nomor: 30-K/PMIII16/AD/II/2014 sudah tepat sebagaimana dakwaan alternatif oleh oditur militer yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer, Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014

3. Skripsi yang ditulis oleh Fhemy Ariska, B11112146, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016.

- a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer Iii-16 Makassar Putusan No.50-K/Pm.Iii-16/Al/Iv/2015).

b. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkoba golongan I oleh oknum prajurit TNI dalam Perkara No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015.

c. Hasil Penelitian:

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkoba golongan I oleh oknum TNI dalam perkara No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 telah tepat, karena Terdakwa telah terbukti dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan telah memenuhi unsure-unsur rumusan delik tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Terdakwa mengandung unsure kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat, Terdakwa juga meyakini bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap Hakim tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan militer, karena Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi aturan yang berlaku padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana untuk seluruh Prajurit TNI untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan membantu aparat penegak

hukum untuk memberantas narkoba, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa dikenakan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Namun dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Serta Majelis Hakim juga tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

F. Batasan Konsep.

1. Pembagian Kewenangan yaitu pemberian kewenangan kepada lebih dari satu instansi dalam pelaksanaan suatu fungsi atau tugas.
2. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer.

4. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
5. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.
6. Militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum

ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dan Polisi Militer dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan militer.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan konsep mengenai Pembagian Kewenangan, Badan Narkotika Nasional, Polisi Militer, Tindak Pidana Narkotika dan Militer.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.